

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok  
Pertambangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor  
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan  
Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6573.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan  
Berusaha Berbasis Risiko, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
6617.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan  
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6721.

### Artikel, Buku, Jurnal

Agung, Dian, *Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah*, NEGARA HUKUM: Vol. 11, No. 2, November 2020.

Al Jundy, Wildan, *Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Memutus Mengabulkan Permohonan Kasasi Perkara Pertambangan dengan Adanya Disenting Opinion (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/Pid.SUS.LH/2016)*, Jurnal Verstek, Vol. 8 No. 2 Tahun 2020, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.

BPHN, *Analisis dan Evaluasi Kerjasama Dalam Usaha Pertambangan*, <https://www.bphn.go.id/data/documents/pertambangan.pdf>.

Budiarjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Eko, Richardus, *Sitem Sentralisasi dan Desentralisasi*, KOJI999 Nomor 259, 25 Mei 2013.

Ennandrianita, Fine, *Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Saat Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi (Vol.6 No.2).

Fransiska, Michele, *Eksistensi Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Mencapai Good Governence*, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1891>.

Halmes, Sherlock, *Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan*

Pemerintahan, SASI Vol. 2 6, No. 4, Oktober - Desember 2020.

Hanif Sidiq, Mohammad, 2016, Skripsi “*Politik Hukum Kewenangan Pembatalan*

*Peraturan Daerah/Kabupaten/Kota Oleh Gubernur*”, Universitas

Muhammadiyah Malang.

Hartana, *Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor*

*Pertambangan Batubara di Daerah)*. Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 3,

Nomor 1, Februari 2017.

Haryati, Tri, *Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan*

*Implikasinya Terhadap Bentuk Penguasaan Pertambangan*, Jurnal Hukum

& Pembangunan Tahun ke-49 No.3 Juli-September 2019.

Hayati, Tri, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No.4*

*Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Hentschel, Thomas, 2003, *Artisanal and Small Scale Mining, Challenge and*

*Opportunity*, Russell Press Ltd, Nottingham.

Ihsan, Rahdian, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

*Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004*, GaneÇ Swara Vol. 9

No.1 Maret 2015, hlm. 113.

Imanuel, Victor, *Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batuara Pasca*

*Berlakunya Undang Undang Minerba*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor

3, September 2012.

Iriawan, Beddy, 2013, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan*

*Empirik*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Isharyanto, 2016, *Politik Hukum Model Pembagian Kewenangan Dalam Rangka Desentralisasi di Indonesia*, Halaman Moeka Publishing, Jakarta.
- Isharyanto, 2016, *Politik Hukum*, Bebuku Publisher, Surakarta.
- Jauchar B. *Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Kewenangan Pengelolaan Hutan, Pertambangan dan Perkebunan)*, Jurnal Borneo Administrator, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2012.
- Koeswahyono , Imam, *Hak Menguasai Negara, Perspektif Indonesia Sebagai Negara Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-38 No.1 Januari-Maret 2008.
- Kusyirah, Sri, 2019, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, UNISSULA PRESS, Semarang.
- Kuyek, Joan, 2005, “*Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources*”. *Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit, July 28, 2005*.
- Ma’ruf , Umar, 2014, *Hak Menguasai Dari Negara Atas Tanah dan Asas-Asas Hukum Pertanahan*, UNISSULA PRESS, Semarang.
- Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Mahfud MD. 2014. *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.

- Mahmud, Peter, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta.
- Marzuki, Laica, *Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Vol. 3 Nomor 1, Maret 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, LIBERTY, Yogyakarta.
- Mina, Riso, *Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup*, ARENA HUKUM Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Mukmin Zakie, *Kaitan Kuasa Pertambangan dengan Hak-Hak Atas Tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria*, Jurnal Hukum. No. 13 Vol. 7, APRIL 2000.
- Nadir, Sakina, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1 Tahun 201.
- Nuryanti, Dati, 2016, Skripsi, “*Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*”, Universitas Pasundan.
- Okka, Meggi, dkk, *Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat Dalam Bidang Minerba Di Indonesia*, Privat Law Edisi 07 Januari - Juni 2015.

Pardede, Marulak, *Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan terhadap Kedaulatan Negara*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 18 No. 1, Maret 2018.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, Jakarta.

Pigome, Martha, 2011, *Politik Hukum Pertambangan Indonesia dan Pengaruhnya Pada Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah*, MMH, Jilid 40 No. 2 April 2011.

Pigome, Martha, *Politik Hukum Pertambangan Indonesia dan Pengaruhnya Pada Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah*, Op.Cit.

Prasojo, Eko, dkk., *Konsep Dasar Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*, pustaka.ut.ac.id., Dapat diakses pada laman: <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MAPU5203-M1.pdf>

Pricilla, Flora, *Implementasi Asas Desentralisasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut di Indonesia*, Jurnal FORMAS Vol. 2- No- 2, Februari 2009.

Putri, Rika, dkk, *Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 8 No. 1 Tahun 2021.

Rahmat, *Kontribusi Industri Tambang bagi Pendapatan Negara Capai Rp 46,6 Triliun*, wartaekonomi.co.id. Diakses 12 Agustus 2021. Dapat dilihat pada laman: <https://www.wartaekonomi.co.id/read212192/kontribusi-industri-tambang-bagi-pendapatan-negara-capai-rp466-triliun>.

Risal, Samuel, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Era Desentralisasi*, Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, Vol. 1 No.2 Tahun 2018

Rudy, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Indepth Publishing, Bandar Lampung.

Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.

Salim, 2014, *Hukum Pertambangan, Mineral & Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salinding, Marhen B., *Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019.

Salman Al-Farisi, Muhammad, *Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020*, Jurnal Ilmiah Ecosystem Volume 21 Nomor 1, Januari–April 2021.

Santoso, Bambang, 2021, *Politik Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan.

Santoso, Lukman, 2013, *Hukum Pemerintah Daerah, Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Yogyakarta.

Sasmita, Tody, dkk, 2014, *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian Terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No. 50/ PUU-X/ 2012; dan Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010)*, STPN PRESS, Yogyakarta.

Sie Infokum – Ditama Binbangkum, *Penambang Umum Batubara*, <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/PertambanganUmum.pdf>. Diakses 27 Mei 2022.

Simanjuntak, Reynold, *Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015.

Solechah, Nur, Siti, *Realisasi Desentralisasi Sektor Pertambangan*, Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, Vol. IV, No. 12, 2012.

Suparto, *Otonomi Daerah Di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya*, In: Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan, 15 November 2017, FISIPOL Univ. Maritim Raja Ali Haji.

Surypatty, Viktor I., 2009, Tesis “*Paradigma Baru Hukum Pertambangan Indonesia Mengganti Sistem Kontrak Karya Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral*” Universitas Indonesia, Jakarta.

Vivi, Aullia, Ringkasan Disertasi, Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Berbasis Kesejahteraan Profetik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wahyono, Padmo, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wahyono, Padmo, *Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, Forum Keadilan, No. 29, April 1991.

Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ideas Publishing, Gorontalo.

Yunianto, Bambang, dkk, *Persoalan Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009*, Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Volume 7, Nomor 4, Oktober 2011.

Zakie, Mukmin, *Konsepsi Hak Menguasai Negara Atas Sumberdaya Agraria*, JURNAL HUKUM. No. 29 Vol. 12 Mei 2005.

Zsazsa, Aminah, dkk, *Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. 10, No. 1, Februari 2021.

### Internet

Haryandi, *Menunggu Formalisasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI)*, uts.ac.id.

Diakses 27 Mei 2022. Dapat dilihat pada laman:

<https://uts.ac.id/2021/10/27/menunggu-formalisasi-pertambangan-tanpa-izin-peti/>

Margono, Tri, dkk., *Kajian Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan*

*Rakyat*, lipi.go.id. Diakses 27 Mei 2022. Dapat diakses pada laman:

<http://lipi.go.id/publikasi/kajian-regulasi-dan-kebijakan-pengelolaan-pertambangan-rakyat-/39546>

Rahmat, *Kontribusi Industri Tambang bagi Pendapatan Negara Capai Rp 46,6*

*Triliun*, wartaekonomi.co.id, Diakses 12 Agustus 2021. Dapat dilihat pada

laman: <https://www.wartaekonomi.co.id/read212192/kontribusi-industri-tambang-bagi-pendapatan-negara-capai-rp466-triliun>.